

## Kepemimpinan instruksional dalam implementasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19

Achmad Muhammad <sup>a,1</sup>

<sup>a</sup>Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

<sup>1</sup> achmadmu95@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Keywords

Kepemimpinan instruksional  
Pembelajaran jarak jauh  
Covid-19

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kepemimpinan instruksional atau kepemimpinan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 di sekolah/madrasah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengambil jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian survei yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang dibagikan melalui google form. Berdasarkan signifikansinya bentuk dari penelitian berikut merupakan penelitian mendasar atau basic research, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena penerapan kepemimpinan instruksional (kepemimpinan pembelajaran) di masa pandemi Covid-9. Limitasi dan keterbatasan penelitian ini dibatasi dengan hanya menjadikan Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai subyek penelitian, yakni sejumlah 76 Kepala SMA/SMK dan MA Muhammadiyah. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis Miles & Huberman, yaitu data reduction, data display dan data conclusion drawing/verification. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan kepemimpinan instruksional (pembelajaran) kepala sekolah/madrasah Muhammadiyah di DIY pada masa pandemi Covid-19 dalam implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) perlu dioptimalkan dalam bentuk beberapa kegiatan; mulai dari memahami kebijakan, Mendesiminasikan kebijakan kepada warga sekolah dan stakeholder, melakukan monitoring dan evaluasi sampai ikut menyelesaikan berbagai kendala, sehingga pembelajaran jarak jauh (PJJ) lebih efektif, layanan pendidikan yang maksimal bagi seluruh peserta didik dapat diberikan, dan di sisi lain tetap berupaya menjaga mutu pembelajaran.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### 1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 saat ini telah menjadi perhatian utama semua negara. Pandemi ini mulai menghebohkan dunia pada awal tahun 2020, yakni setelah merebaknya coronavirus jenis baru (SARS-Co-V-2) dan penyakitnya disebut coronavirus *disease* 2019 (Covid-19). Diketahui, pandemi ini bermula dari merebaknya kasus Covid-19 di Wuhan, Tiongkok. Sampai Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) sebagaimana dikutip Yuliana (2020) dalam *Wellness and Healthy Magazine*, merilis data bahwa 65 negara telah dipastikan terjangkit virus ini, termasuk Indonesia. Akibat sifat penularannya yang mudah dan terbilang cepat, yaitu terutama melalui droplet, maka pemerintah gencar menyosialisasikan penerapan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus ini, seperti penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun ataupun handsanitizer sampai dengan

tinggal atau berdiam diri di rumah (*stay at home*) untuk mengurangi interaksi dan kontak fisik, serta berbagai penerapan protokol kesehatan lainnya. Karena itu, pandemi Covid-19 pun sangat berdampak terhadap semua sektor kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan.

Terkait penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon kondisi ini dengan menetapkan pola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar dari Rumah (BdR) bagi semua sekolah. (SE Mendikbud No. 3 Tahun 2020). Demikian pula organisasi Muhammadiyah yang memiliki sejumlah besar Amal Usaha bidang pendidikan juga sigap merespon kondisi tersebut dengan dikeluarkannya Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (SE PPM No. 005 Tahun 2020) yang kemudian ditindaklanjuti oleh unsur-unsur di bawahnya. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta, melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) yang menjadi penyelenggara dan pembina SMA/SMK Muhammadiyah di DIY menerjemahkan Maklumat PP Muhammadiyah ke dalam kebijakan pembelajaran (BdR) beserta pedomannya. Permasalahannya adalah bagaimana kepala sekolah/madrasah memimpikan implementasi kebijakan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BdR) pada wilayah teknis penyelenggaraan pembelajaran oleh sekolah/madrasah. Di satu sisi kondisi sumber daya dan kesiapan fasilitas penunjang berbeda antara satu sekolah/madrasah dengan yang lainnya. Di sisi lain model kepemimpinan masing-masing kepala sekolah/madrasah juga beragam.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### 2.1. Pembelajaran Jarak Jauh

Istilah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan pembelajaran daring (dalam jejaring) serta Belajar dari Rumah (BdR) dewasa ini seringkali digunakan secara ambigu. Istilah-istilah tersebut sebagaimana Moore, dkk. (2011) mengacu pada tiga model kegiatan pembelajaran, yakni pembelajaran jarak jauh, e-Learning, dan pembelajaran daring. Pembelajaran jarak jauh sendiri didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh pelajar/orang yang sedang menempuh pendidikan untuk belajar secara jarak jauh. (King, dkk [2001], dalam Moore, 2011). E-Learning didefinisikan sebagai sebuah sarana pendidikan elektronik yang dapat digunakan oleh individu untuk belajar (Moore, Dickson-Deane, & Galyen, 2011). Pembelajaran daring didefinisikan sebagai kegiatan belajar yang dilakukan dengan mengandalkan konektivitas, fleksibilitas, dan interaksi secara daring. Pembelajaran daring diyakini saling berkaitan dengan konteks definisi pembelajaran jarak jauh atas kesamaan dari karakteristik yang dimiliki keduanya, di mana pembelajaran daring merupakan implementasi dari praktik pembelajaran jarak jauh yang membutuhkan konektivitas dan aksesibilitas (Moore, Dickson-Deane, & Galyen, 2011). Jadi, Secara konseptual PJJ, adalah belajar yang direncanakan, yang biasanya terjadi ditempat lain diluar tempat mengajar (ruang kelas). Oleh karena itu, diperlukan metode, strategi dan teknik-teknik dalam desain pembelajaran, metode komunikasi melalui berbagai media, dan penataan organisasi pembelajaran secara khusus.

Dalam konteks kondisi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang cukup merata pada semua sektor kehidupan dan di semua lini masyarakat, dimana masyarakat dituntut untuk menerapkan berbagai protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19, pembelajaran jarak jauh menjadi kontekstual dan memperoleh signifikansi, karena ia menjadi alternatif utama yang paling realistis. Terlebih, pembelajaran jarak jauh semakin relevan sebagai implikasi positif dari kemajuan teknologi digital. Kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi menyediakan peluang bagi masyarakat untuk menciptakan ruang publik siber, termasuk untuk kepentingan pembelajaran. Ruang siber sendiri didefinisikan sebagai ruang publik virtual yang dikonstruksikan oleh masyarakat, di mana ruang tersebut mampu memberikan pengaruh pada aspek individual, antar individu, dan komunitas (Pialang, 2012). Dengan demikian, sekolah sebagai komunitas pembelajaran utama yang terdiri dari guru, peserta didik dan orang tua (sebagai pendamping) dapat memanfaatkan ruang siber ini sebagai alternatif model pembelajaran di masa pandemi yang efektivitasnya mesti dikendalikan oleh kepala sekolah/madrasah sesuai perannya dalam kepemimpinan pembelajaran.

## 2.2. Kepemimpinan Instruksional

Setidaknya ada 9 model kepemimpinan; manajerial, partisipatif, transformatif, interpersonal, transaksional, postmodern, kontingensi, moral, pembelajaran (instruksional). Dalam penelitian ini dipilih kepemimpinan Instruksional atau kepemimpinan pembelajaran karena merupakan faktor penting dalam menentukan keefektifan sekolah (Huber, 2010). Kepemimpinan instruksional juga dianggap sebagai komponen paling penting dalam menjaga mutu pembelajaran (Bush, 2008 & Hammond, et al. 2010). Konsep kepemimpinan instruksional atau kepemimpinan pembelajaran sendiri cukup kompleks dan multi-interpretasi mengenai segala sesuatu yang harus dilakukan kepala sekolah (Gurr & Drysdale, 2008). Daresh dan Playco (1995) mendefinisikan kepemimpinan pembelajaran sebagai upaya memimpin para guru agar mengajar lebih baik, yang pada gilirannya dapat memperbaiki prestasi belajar siswanya.

Brundrett dan Davies (2010) menyatakan dimensi Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yaitu menetapkan visi, misi dan tujuan sekolah, mengelola program pembelajaran, dan mempromosikan iklim belajar yang positif. Penetapan misi sekolah meliputi: pencaangan misi yang jelas di sekolah; berpusat pada pengembangan akademik yang sesuai bagi warga sekolah; penetapan prioritas misi untuk kinerja guru; penyampaian visi dan misi yang harus diketahui oleh guru; misi disampaikan, dengan aktif didukung, dan diberi contoh oleh kepala sekolah. Kepala Sekolah mengelola program pembelajaran, yaitu melakukan supervisi dan melakukan evaluasi pembelajaran, mengkoordinasikan kurikulum, dan memantau perkembangan siswa serta mengelola iklim belajar di sekolah yang kondusif. Misalnya melindungi waktu belajar, mengupayakan pengembangan profesional, memelihara dan memperbaiki performa sekolah, menyediakan dana bagi pengembangan guru untuk memenuhi standar, menyediakan dana untuk pembelajaran. Berdasar tujuan sekolah, Kepala sekolah mengelola sumber daya manusia, Sarana prasarana dan pembudayaan iklim belajar yang positif untuk pencapaian prestasi siswa agar meningkat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Materi Diklat Implementasi Kurikulum 2013 untuk Kepala Sekolah menyebutkan tugas kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) Pengembangan sekolah dengan dukungan pengambilan keputusan berbasis data; (2) Menyelaraskan hubungan kerja; (3) Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Meningkatkan motivasi warga sekolah. Keempat tugas kepala sekolah tersebut memperjelas deskripsi Brundrett dan Davies (2010). Pengambilan keputusan untuk menentukan misi sekolah tentu saja harus berdasarkan data. Sedangkan mengelola pembelajaran tentu harus dimaknai dengan menyelaraskan hubungan kerja. Hubungan kerja antara pendidik dan tenaga kependidikan yang selaras dan memiliki peluang untuk meningkatkan kompetensi, akan menjadi modal tumbuhnya iklim belajar yang positif di sekolah. Jika iklim belajar di sekolah positif tentu akan meningkatkan motivasi warga sekolah (Hoy & Miskel dalam Hadiyanto, 2016:3) untuk semakin mengembangkan sekolah. Dampak lanjutannya hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat. Untuk itu, kepemimpinan pembelajaran menurut Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (2011:13-14) harus memenuhi beberapa karakteristik berikut; (1) Mengembangkan misi dan tujuan; (1) mengelola program pembelajaran; (2) mendorong iklim pembelajaran akademis; (3) mengembangkan fungsi produksi pendidikan (4) mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif.

## 2.3. Penerapan Kepemimpinan Instruksional di Masa Pandemi Covid-19

Seorang kepala sekolah tidak hanya cukup memahami konsep dan karakteristik kepemimpinan pembelajaran, namun lebih lanjut harus dapat mengimplementasikannya dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. penerapan kepemimpinan pembelajaran dalam implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh di sekolah/madrasah Muhammadiyah di D.I Yogyakarta dapat dipilah menjadi beberapa kegiatan berikut:

Pertama, memahami kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dimasa pandemi Covid-19, kepala sekolah/madrasah memegang peranan vital sebagai leader dalam menciptakan iklim pendidikan yang tetap kondusif dan memastikan peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran yang efektif. Untuk itu, kepala sekolah/madrasah adalah orang pertama yang harus memahami kebijakan dan regulasi terkait. Sebagian besar, yakni 55,1 % kepala sekolah/madrasah dapat memahami kebijakan tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Sekolah/Madrasah Muhammadiyah dan Pedoman Penyelenggaraannya yang menjadi acuan penerapan PJJ dengan sangat baik, sementara sisanya (44,9%) dapat memahaminya dengan baik.

Kedua, mendesiminasikan kebijakan kepada warga sekolah dan *stakeholder*. Kepala sekolah/madrasah memikul tanggung jawab terhadap layanan pendidikan dan keamanan serta kenyamanan warga sekolahnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Rasa aman dan nyaman ini harus dirasakan oleh guru, peserta dan orangtua. Termasuk dalam hal kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi darurat Covid-19. Ujung tombak implementasi kebijakan PJJ sesungguhnya adalah para guru yang melakukan pengelolaan kelas pembelajaran dan berinteraksi dengan para peserta didik secara langsung. Karena itu, kepala sekolah semestinya mendesiminasikan kebijakan tersebut khususnya kepada guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini 62,9 % kepala sekolah/madrasah melakukan desiminasi kepada kepala guru dan tenaga kependidikan sehingga mereka dapat memahami kebijakan dengan sangat baik, sementara 37,1 % juga melakukan desiminasi sehingga kebijakan pjj dapat dipahami para guru dengan baik. Di samping itu, peran orang tua dalam pelaksanaan PJJ di masa pandemi sangat sentral, terutama dalam mendampingi putra-putri mereka dalam proses pembelajaran. Meski beberapa studi menunjukkan bahwa masih banyak (21,7 %) orang tua yang kurang dapat menjalankan peran ini dengan baik (Wiwin et.al, 2021).

Ini bisa saja disebabkan karena mereka kurang terbiasa dalam menjalankan peran tersebut secara intensif, oleh karena minset pendidikan yang terbangun selama ini (sebelum masa pandemi) adalah bahwa pendidikan putra-putri mereka sudah dapat dicukupkan dan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah (*schooling*) dan mengandalkan peran-peran para guru, sehingga sejalan dengan pendapat Devi (2020) diperlukan adaptasi peran keluarga (orang tua) dalam pendampingan anak sebagai penguatan internal pembelajaran daring di masa pandemi. Oleh itu, memberikan pemahaman kebijakan pjj kepada orang tua peserta didik menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah/madrasah. Demikian pula kepada para peserta didik sebagai subjek utama pembelajara. Ini terbukti bahwa masih ada 11,2 % yang oleh kepala sekolah/madrasah dianggap kurang dapat memahami kebijakan PJJ. Sementara sebagian besar (74,2) cukup baik dalam memahami kebijakan tersebut dan hanya 14,6 % yang dapat memahaminya dengan sangat baik.

Ketiga, menyiapkan program. Kepala sekolah/madrasah sebagai pemimpin pembelajaran tidak cukup hanya memahami dan mendesiminasikan kebijakan PJJ kepada seluruh warga sekolah, tetapi juga menyiapkan program PJJ di tingkat satuan pendidikan dengan berbagai perangkat dan fasilitas pendukungnya. Semua sekolah/madrasah menuangkan Program PJJ ini setidaknya dalam Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) dan 74 % sekolah/madrasah yang melengkapinya dengan Prosedur Operasional Standar (POS). Dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut hampir semua (98,9 %) sekolah/madrasah selalu melibatkan guru secara intensif. Artinya kepala sekolah/madrasah telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan guru dan membentuk team work dalam pengembangan pembelajaran di sekolah/madrasah masing-masing. Penyiapan program pjj oleh sekolah/madrasah tidak hanya berupa dokumen, tapi juga penyiapan sumber daya, khususnya para guru yang menjadi pelaku utama PJJ. Penyiapan ini diantaranya dengan upaya peningkatan literasi digital guru baik dengan pelatihan maupun menyampaikan tutorial penggunaan platform pembelajaran.

Dalam hal ini 84,2 % melakukannya secara intensif, bahkan 11,2 diantaranya sangat intensif. Sementara 14,6 % kurang intensif dan hanya 1 sekolah yang sama sekali tidak melakukannya. Ini dapat dipahami bahwa mayoritas kepala sekolah/madrasah telah menerapkan kepemimpinan visioner sekaligus kultur baru dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang mengharuskan adanya akselerasi kemampuan dalam keterampilan digital. Kondisi yang tercipta sebagai dampak pandemi boleh dikata telah memaksa hampir semua orang untuk melakukan percepatan penguasaan dan penggunaan teknologi digital lebih cepat dan masif dari wacana yang dibawa oleh revolusi 4.0, termasuk dalam dunia pendidikan yang oleh Goldschmidt & Msn (2020) dikatakan bahwa Tsunami pembelajaran online telah terjadi hampir diseluruh dunia selama pandemi COVID-19.

Keempat, melakukan monitoring dan evaluasi. Menjaga mutu pembelajaran sebagai salah satu aspek tolok ukur kualitas penyelenggaraan pendidikan sekolah/madrasah muhammadiyah menjadi salah satu prioritas kebijakan PJJ di masa pandemi covid-19. Berbagai upaya mulai dari penyiapan program, peningkatan kompetensi guru dan peningkatan ketersediaan sara pendukung dilakukan. Dalam pelaksanaan pembelajaran monitoring dan evaluasi adalah bagian integral dari kepemimpinan kepala sekolah/madrasah yang menjadi level manajemen puncak di sekolah/madrasah (Triwiyanto, 2015). Dalam implementasinya, monitoring dan evaluasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini dilakukan secara berkala untuk dapat memantau kinerja guru dalam proses pembelajaran sekaligus mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaannya untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan. Beberapa sekolah/madrasah (23,6%) menggunakan skema pekatan untuk melakukan evaluasi keteraksanaan pembelajaran jauh. Sementara sebagian besar (59,6%) melakukannya setiap bulan dan 14,6 % melakukan di akhir semester serta 2,2% tidak melakukan evaluasi. Pada dasarnya semakin intensif monitoring dan evaluasi dilakukan, upaya menjaga mutu pembelajaran dapat dilakukan secara lebih baik, karena kepala sekolah/madrasah dapat melakukan perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran. Bahkan, Skema yang tepat dalam monitoring dan evaluasi dapat memberikan informasi *real-time* yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap proses pembelajaran tersebut (Patricio R., 2010), termasuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi peserta didik dalam belajar.

Kelima, membantu mengatasi kendala. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi ini masih menyisakan beragam kendala (Kompas.com 16/12/2020). Mulanya, banyak anggapan bahwa tanggung jawab pengajar dalam melaksanakan PJJ jauh lebih ringan ketimbang dengan pembelajaran tradisional, meski kemudian faktanya banyak aspek yang harus dikembangkan dan ditingkatkan oleh guru, seperti kemampuan manajemen kelas daring, metode dan strategi pembelajaran online, serta penguasaan ketrampilan digital itu sendiri. (Rasmitadila, 2020). Memang, pembelajaran *online* memberikan kemudahan dalam memberikan transfer informasi pada berbagai situasi dan kondisi. Ragam manfaat dari kemudahan pembelajaran *online* didukung berbagai platform mulai dari diskusi hingga tatap muka secara virtual. Namun, perlu diingat bahwa kemampuan orang tua memberikan fasilitas pembelajaran *online* berbeda (Herliandry, 2020), dan ini menjadi kendala tersendiri. Selain itu, kendala pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini juga dialami oleh peserta didik, bahkan berbagai hambatan atau kendala tersebut sampai membuat mereka tidak senang dengan kebijakan belajar dari rumah atau *School from Home*. (Megawanti, 2020). Kondisi di atas tentu membutuhkan peran kepala sekolah/madrasah sebagai pemimpin pembelajaran untuk ikut terlibat secara aktif dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai kendala tersebut. Setidaknya memberikan berbagai arahan dan bimbingan kepada para guru. Dalam implementasinya, 42,7 % kepala sekolah/madrasah selalu memberikan masukan, arahan dan bimbingan kepada guru yang mengalami kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Sementara, 43,8% menyatakan sering melakukan langkah tersebut dan 15,3% lainnya kadang-kadang melakukannya.



Demikian pula sekolah/madrasah memberikan layanan alternatif kepada para peserta didik yang terkendala dalam pembelajaran daring, diantaranya kunjungan rumah (*home visit*) 30.7%, pemberian modul/materi ajar cetak (58%), pembelajaran tatap muka terbatas atau konsultasi (6,8%), serta bentuk belajar mandiri (4,5%). Disini terlihat bentuk layanan yang diberikan cukup beragam dengan tingkat efektifitas yang masih perlu ditingkatkan, seperti pemberian modul/materi cetak dan belajar mandiri tanpa interaksi dan komunikasi antara guru dengan peserta didik. Kurangnya bimbingan oleh guru menjadi salah satu kendala yang dirasakan oleh peserta didik, dikatakan dalam Megawanti (2020), bahwa a ketidakberadaan seorang guru secara nyata menjadi kendala tersendiri bagi siswa dalam memahami penjelasan, jawaban, bahkan menjadi sebab perasaan kurang bahagia (bosan) saat menjalani PJJ dari rumah.

### 3. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah memaksa sejumlah pemangku kepentingan mengambil kebijakan untuk mengurangi penyebarannya di tengah masyarakat, termasuk Muhammadiyah, sebagai organisasi sosial masyarakat, yang menjadi penyelenggara sekolah/madrasah dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara nasional maupun di wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya. Salah satu sasarannya adalah warga sekolah, sehingga diambil kebijakan “merumahkan” para peserta didik dan “memaksa” berlangsungnya kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan memanfaatkan dunia maya (belajar *online*). Sesuatu yang kini populer dan sangat akrab bagi warga sekolah, khususnya guru dan peserta didik. Tetapi, masih banyak yang perlu dibenahi, diantaranya adalah bagaimana mengoptimalkan peran kepala sekolah/madrasah dalam menjalankan peran kepemimpinan instruksional (pembelajaran) implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh sehingga lebih efektif; memberikan layanan pendidikan yang maksimal bagi seluruh peserta didik sebagaimana haknya di satu sisi, dan di sisi lain tetap berupaya menjaga mutu pembelajaran.

### Referensi

- Agus Purwanto, dkk. 2020. “Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar”. *Jurnal EduPsyCoun*. Volume 2, No. 1. Universitas Muhammadiyah Enrekang.
- Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Tras Yogyakarta
- Dana Riksa Buana. 2020. ”Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 7. No. 3.
- Daresh, John C., Playko, Marshal A. 1995. *Supervision as a Proactive Process*. Waveland Press.
- Davies, Brent. & Brundrett, Mark. 2010. *Developing Successful Leadership*. Springer Dordrecht Heildeberg. London.
- Hadiyanto. 2016. *Teori & Pengembangan Iklim Kelas & Iklim Sekolah*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Herliandry, L. D., Nurhasanah, N., Suban, M. E., & Kuswanto, H. (2020). Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.22. No1. <https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286>
- Luh Devi Herlidry dkk. 2020. “Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19” dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 22, No. 1. Universitas Negeri Jakarta.
- Megawanti, Priarti. Dkk. 2020. “Persepsi Peserta Didik Terhadap Pjj Pada Masa Pandemi Covid 19”. *Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol. 7 No.2. DOI: <http://dx.doi.org/10.30998/v7i2.6411>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Essex: Pearson Education.
- Patricio R., 2010, *A Monitoring and Evaluation Scheme for an ICT-SUpport Education Program in Schools*, Università Roma Tre, Italy

- Pilliang, Yasraf. Amir. (2012). Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal Socioteknologi*, Vol.11. No.27. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/311442>
- Pusbangtendik. 2011. *Kepemimpinan Pembelajaran: Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Kepala sekolah*. Jakarta.
- Rasmitadila, et.al. "The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning during the COVID-19 Pandemic Period: A Case Study in Indonesia". *Journal of Ethnic and Cultural Studies*. 2020. Vol. 7. No. 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/388>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*. Riska Cipta. Jakarta
- Teguh Triwiyanto, 2015. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Untuk Penilaian Kinerja Manajerial Kepala Sekolah. *Cakrawala Pendidikan Februari*. Vol. XXXIV, No. 1. DOI: <https://Doi.Org/10.21831/Cp.V1i1.4177>
- Wawan Dhewanto. 2013. *Intrapreneurship: Kewirausahaan Korporasi*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Yuliana. 2020. "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur". *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2 No.1.